

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peristiwa di tahun 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang amat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia khususnya bagi perjalanan politik Islam. Peristiwa tersebut turut menjadi titik balik bagi perpolitikan mereka untuk menuangkan gagasan-gagasan politiknya secara terbuka setelah sekian lama dikungkung oleh rezim baik orde lama maupun orde baru.

Sepanjang sejarah Republik Indonesia, entitas Islam politik menjadi satu-satunya kelompok yang banyak berdinamika baik dengan kekuasaan yang sah maupun dengan antar kelompoknya sendiri. Keadaan ini terjadi yang paling awal bermula ketika Masyumi, sebagai partai yang didukung oleh ormas besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengalami perpecahan akibat konflik kepentingan. Sejak saat itu hingga hancurnya orde baru pada Mei 1998, kelompok Islam yang berkacah dalam dunia politik ini telah mengambil

jalannya masing-masing untuk bersikap terhadap Negara dan terus bertentangan antar aliran yang satu dengan aliran yang lain, bahkan hingga sekarang. Dari pertentangan-pertentangan yang pernah terjadi, yang paling mencolok dari yang lalu adalah menguatnya gerakan Islam politik yang mulai menjamah kekuasaan dengan berbagai mobilisasi massa besar-besaran diluar kekuasaan, dan yang lainnya mengampanyekan bahwa Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi umat diseluruh alam dan mengusung moderasi sebagai kampanye dakwahnya.

### **1. Populisme Islam**

Kebangkitan gerakan Islam atau yang disebut sebagai populisme Islam akhir-akhir ini telah menjadi *trand* global yang mengkhawatirkan negara-negara Kapitalis dibelahan dunia. Tidak sebatas menjadi gerakan politik, Islam dengan aliran ini lebih jauh membawa gerakannya untuk mengganti sistem tatanan politik kenegaraan yang dinilai telah gagal membawa umat manusia pada kesejahteraan yang adil makmur. Dalam sebuah jurnal yang ditulis Arif Darmawan, ia

memberikan gambaran umum tentang gejala kebangkitan

Islam politik ini seperti berikut:

Kebangkitan politik populis dalam 15 tahun terakhir, yang sangat terlihat di kawasan Amerika Latin, Eropa, dan beberapa kawasan di dunia menjadi sebuah fenomena global dan bisa dibaca sebagai sebuah tanda dan respon terhadap krisis kronis dalam demokrasi liberal. Di satu sisi gerakan politik populis tersebut menarik perhatian masyarakat sipil dan mengkampanyekan adanya pembangkangan sipil karena dengan kondisi demokrasi yang ada menjanjikan pengembalian kekuasaan kepada rakyat serta memaksa sistem politik untuk memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Disisi lain, populisme juga sering dianggap membahayakan demokrasi dengan adanya janji-janji palsu, ketidakpedulian dengan permasalahan manajemen ekonomi, serta secara keseluruhan tidak ada penghormatan terhadap konstitusionalisme dan prosedur demokrasi.<sup>1</sup>

Apa yang diutarakan Darmawan dari pendahuluan jurnalnya diatas memang betul-betul terjadi dan bahkan menjalar ke Indonesia sejak enam tahun terakhir. Strategi yang digunakan oleh politisi borjuasi dengan menggaet kelompok Islam konservatif sebagai sekutu politik adalah keniscayaan yang kerap terjadi ditengah pentas politik nasional banyak dipenuhi dengan gerakan-gerakan mereka.

---

<sup>1</sup>Arif Darmawan, "Gerakan Populis sebagai Tren Global: Dari Amerika Latin sampai Occupy Movement", Jurnal INSIGNIA, Vol. 4, No. 2 (November 2017), <https://jos.onsoed.ac.id>, diunduh pada 4 Januari 2020

Kebangkitan populisme Islam yang sedang menjadi *tren* tidak hanya terikat pada munculnya figur tertentu yang menjadi tokoh politik disuatu kawasan, tetapi juga menjadi satu bentuk gerakan transnasional yang mengglobal dalam bentuk protes dan mobilisasi massa, fashion, busana dan lain-lain yang melibatkan teknologi informasi (*cyber politics*), yang arah tujuannya adalah untuk melawan ketimpangan global terutama dalam struktur ekonomi yang tidak merata. Kebangkitan populis Islam ini tidak hanya sekedar gerakan reaksioner yang berada dalam satu kawasan tertentu, tetapi merupakan sebuah gerakan yang dekat dengan pusat kekuasaan global, dan diinisiasi oleh kelompok terpelajar, aktivis kreatif, dan populasi urban. Ditengah kemajuan zaman yang serba canggih, teknologi informasi menjadi penopang utama yang paling membantu dalam mengkampanyekan program-program populis secara langsung atau lewat sekutunya yang sedang menempuh kekuasaan.

Secara umum narasi populisme dalam perbincangan politik kontemporer dilevel global maupun nasional dengan

latar belakang konstalasi politik yang mengatasnamakan rakyat, sangat mujarab untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas aktor politik tertentu untuk tujuan elektoral. Dalam hal demikian, dapat dilihat akar sejarah dan pengaruh diranah global khususnya yang terjadi di Amerika Latin, seperti yang disampaikan oleh Juan Grigara:<sup>2</sup>

*“Populisme menjadi satu perbincangan publik yang amat lumrah, sekalipun yang berkarakter neoliberal pada tahun 1990-an”.*

Oleh karena itu Amerika Latin secara historis merupakan akar dari munculnya gerakan populisme yang pertama di dunia pada abad 20 dan menjadi kunci pengaruh tumbuhnya populisme di negara-negara lain.

Uraian diatas menggambarkan bahwa populisme tidak sebatas melekat pada sebuah agama seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, dimana upaya tersebut dilakukan untuk mempopulerkan ketokohan aktor politik tertentu, tetapi

---

<sup>2</sup>Dalam Jurnal Populism in Latin America: *Old and new Populism in Argentina and Brazil*, sebagaimana dikutip oleh Arif Darmawan, Gerakan Populis sebagai Tren Global: Dari Amerika Latin sampai Occupy Movement (Jurnal Insignia Vol.4, No.2 (November 2017), h.3

populisme melekat pula pada ideologi-ideologi baik yang beraliran Kiri progressif maupun kanan konservatif.

Meski keberadaannya telah lama ada, terminologi populisme menjadi topik yang masih terus diperdebatkan dan diperbincangkan diantara para ilmuwan politik. Seperti yang diutarakan Annisa Nur Nia Rahmah:<sup>3</sup>

*“Setetidaknya terdapat tiga variasi dalam mendefinisikan populisme, yaitu: sebagai ideologi, populisme sebagai gaya Politik, dan populisme sebagai komunikasi politik”.*

Hiruk-pikuk politik yang terjadi semasa kolonialisme modern telah memunculkan varian gerakan perjuangan komunitas Muslim yang sangat beragam. Meskipun demikian, kemunculan gerakan-gerakan itu relatif memiliki tujuan yang serupa. Dibawah panji-panji Islam, gerakan perjuangan tersebut lahir sebagai sebuah ekspresi kritik atas ketidakadilan yang lahir dari rangkaian aktivitas ekonomi politik globalisasi dan neo-liberalisme. Termarginalisasi dalam sebuah sistem politik global membuat komunitas-komunitas Muslim itu,

---

<sup>3</sup>Annisa Nur Nia Rahmah, *Pasang Surut Populisme: Satu dekade Populisme Basyir Ahmad di Pekalongan* (Yogyakarta: PolGov, 2019), Cet. I, h.7.

setidaknya memiliki satu persamaan nasib, yaitu: Tertindas.<sup>4</sup> Hal tersebut pada gilirannya melahirkan corak populisme Islam model baru sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Di Indonesia tidak jauh berbeda dengan Negara-negara Muslim yang lain. Sebagai salah satu Negara dengan entitas Muslim terbesar di Dunia, masuknya ekspansi Kapital global ke Negeri ini telah pula mengalienasi entitas Muslim dari kehidupan ekonomi dan politik. Sehingga eksistensi umat Islam dengan beragam narasi-narasi populis mengharuskan kelompok Muslim untuk bangkit merebut kejayaannya kembali.

Melalui praktik kolonialisme, dominasi dan hegemoni negara-negara barat atas dunia Muslim memunculkan fase awal populisme Islam. Ketimpangan antar kelas sosial menjadi satu produk spesifik yang lahir dari rahim sistem politik yang hegemonik saat itu. Dominasi satu budaya atas budaya lainnya melahirkan banyak kalangan yang akhirnya terpinggirkan. Kalangan borjuasi cilik (*petty bourgeoisie*) di Dunia Muslim,

---

<sup>4</sup>Endi Aulia Garadian, "Membaca Populisme Islam Model Baru", Jurnal STUDIA ISLAMIKA: Indonesia Journal For Islamic Studies, Vol 24, No2, 2017, h, 381

yang posisinya tidak begitu diuntungkan oleh sistem politik kolonialisme tersebut, posisinya pun nyaris di ujung tanduk.

Setidaknya ada tiga faktor yang melatari kebangkitan dan meluasnya pengaruh Islam politik tersebut antara lain: *Pertama*, intervensi dan dominasi imperial yang berlanjut. Kekuatan imperialis (terutama Amerika Serikat), memainkan peran aktif dalam mensponsori dan mendorong kelompok-kelompok Islamis sebagai benteng pertahanan melawan nasionalisme sekuler dan kiri. *Kedua*, kegagalan dan kontradiksi internal dari nasionalis sekuler dan kiri stalinis yang menciptakan kekosongan politik; dan *Ketiga*, perkembangan krisis ekonomi di beberapa Negara yang menunjukkan metode kapitalis untuk pembangunan nasional tidak mampu memberikan solusi.<sup>5</sup>

## **2. Politik Moderasi Islam**

Meski gerakan Islam tengah bangkit di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia, tidak semua kelompok Islam nyata-nyata mendukung dan terafiliasi langsung dengan

---

<sup>5</sup> Deepa Kumar, *Islam Politik Sebuah Analisis Marxis*, (Jakarta: Indoprogres, 2016) h. 7-8.

gerakan-gerakan konservatif tersebut. Ada setidaknya kelompok ormas terbesar di Indonesia yang lebih lama berdiri antara lain: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung kampanye Islam Moderat. Karena bagaimanapun, Indonesia adalah “negerinya kaum muslim moderat” (Gus Dur)”<sup>6</sup>

Untuk menangkal gerakan-gerakan Islam konservatif atau populisme Islam yang mulai mengepakan sayapnya keberbagai wilayah dengan aksi-aksi kekerasannya seperti aksi bom bunuh diri dan lain-lain, di Indonesia untuk pertama kalinya ulama mengadakan konferensi se-ASEAN, yaitu *The Jakarta International Islamic Conference*, dengan tema —Strategi Dakwah Menuju Ummatan Wasathon dalam Menghadapi Radikalisme, untuk menyiasati maraknya radikalisme di Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan atas prakarsa Majelis Tabligh dan Dakwah Muhammadiyah bekerjasama dengan Lembaga Dakwah NU, pada tanggal 13-15 Oktober 2003 di Jakarta. Konferensi ini yang mengilhami terbentuknya

---

<sup>6</sup>Eka Prasetiawati, “Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia”, *Jurnal Fikri*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), h. 527

*Center for Moderate Moslem* (CMM) yang dikomandoi Muhammadiyah dan NU untuk mengusung Islam Jalan Tengah bagi Islam Indonesia, di tengah kerasnya tarik-menarik antara gerakan Islam radikal dengan Jaringan Islam Liberal (JIL).<sup>7</sup>

Islam terhitung sebagai agama terakhir dari seluruh agama-agama samawi seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Maidah: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا

*Artinya: Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhoi Islam itu jadi agama mu.*<sup>8</sup>

Islam secara epistemologis artinya Keamanan, perlindungan, konsiliasi dan perdamaian atau dapat berarti pembebasan, penyerahan diri, ketaatan kepada Allah, dan keselamatan dari setiap cobaan yang dapat menimpa seluruh

---

<sup>7</sup>Eka Prasetiawati, "Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia",...h.526.

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung Cimahi: 2011) h. 107

komponen kehidupan seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun.

Adapun tema moderat memiliki dua makna, antara lain: (1) selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; dan (2) berkecenderungan kearah dimensi atau jalan tengah. Oleh karena itu, paham moderat berarti paham yang tidak ekstrem, dalam arti selalu cenderung pada jalan tengah. Muchlis M. Hanafi memaknai moderat (*al-wasath*) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak.<sup>9</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa moderat itu sebuah sikap untuk mengambil jalan tengah diantara liberalisme dan ekstrimisme. Dengan demikian proses dakwah yang dilakukan oleh golongan-golongan yang mempunya

---

<sup>9</sup>Eka Prasetiawati, "Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia", Jurnal Fikri, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), h. 532

sikap moderat ini cukup toleran dan tidak memaksakan kehendak setiap orang dalam memilih agama dan lain-lain. Sementara liberal, seperti yang diketahui, dalam memahami Islam selalu dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah.<sup>10</sup>

Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo. Multikulturalisme merupakan salah satu ajaran Tuhan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang damai di bumi, hanya saja sering tercemari oleh perilaku radikalisme, eksklusivisme, intoleransi dan fundamentalisme.

Indonesia memang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan Negara-negara yang lain. Disamping penduduknya didominasi oleh entitas muslim, juga memiliki keragaman yang cukup banyak. Meski demikian, keberagaman ini tidak cukup disikapi secara eksklusif dengan mengakui

---

<sup>10</sup>Afrizal Nur, Mukhlis Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an", Jurnal *An-Nur* Vol. 4 No.2, 2015, h,209.

keberan kelompoknya secara sepihak saja. Konflik-konflik yang kerap terjadi belakangan, awal mulanya berangkat dari sikap eksklusif ini sehingga mengancam eksistensi kesatuan Negara. Selain karena faktor tersebut, di era modern ini disharmoni keberagaman turut pula didonor oleh pasar bebas (Neoliberalisme) dan Islamisme.<sup>11</sup>

Manifestasi gagasan moderasi beragama ini cukup baru diterapkan di Indonesia akibat menguatnya gerakan-gerakan ekstrimis Islam ini seperti dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Penulis merasa bahwa pertentangan ini tidak akan ada ujung pangkalnya sampai Negara bersikap tegas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdistribusi secara merata. Dan memang, pangkal dari adanya pertentangan antar kelompok di era modern lebih didominasi oleh adanya pasar bebas yang menggerus kerukunan masyarakat secara keseluruhan. .

---

<sup>11</sup>Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia, Jurnal Diklat Keagamaan" Vol. 13 No. 2 (Februari-Maret 2019), h. 49 <https://bdksurabaya.e-journal.id>, diunduh pada 22 Januari 2021

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas dengan mengacu pada rujukan yang ada, penulis memutuskan untuk menulis sebuah penelitian dengan judul: **POLITIK MODERASI PARTAI POLITIK ISLAM ERA REFORMASI DI INDONESIA**

## **B. Fokus Penelitian**

Uraian panjang yang telah disampaikan dalam latar belakang mengenai munculnya gejala baru dalam politik, yaitu populisme Islam adalah satu kajian yang amat menarik untuk tersus dipelajari. Apalagi fenomena tersebut sangat baru terjadi di Indonesia dimana populisme Islam yang digerakan oleh hampir mayoritas kelas menengah keatas begitu antusiasnya memposisikan diri dengan dalih melawan ketimpangan sosial yang padahal notabene untuk kepentingan elite oligarky baru diluar kekuasaan. Dalam hal demikian supaya pembahasannya tidak melebar, penulis membatasi diri mengenai kajian ini. Pembatasan penelitian yang penulis lakukan dalam kemunculan fenomena baru dalam politik sekarang yaitu; populisme Islam pasca reformasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dibuat, penulis mengambil beberapa poin penting untuk dijadikan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah perkembangan partai politik Islam di Indonesia setelah reformasi?
2. Bagaimanakah penerapan politik moderasi di Indonesia pasca Reformasi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui antara lain:

- a. Mengetahui secara mendalam tentang politik moderasi Islam di Indonesia setelah sistem otoritarianisme Orde Baru tumbang. Hal demikian penting diketahui, mengingat demokratisasi yang liberal telah banyak membuka kesempatan dan ruang bagi kelompok masyarakat mengekspresikan ideologi serta gagasannya dalam bentuk nyata yang bisa saja melampaui batas.

- b. Untuk mengidentifikasi partai politik Islam di era reformasi dikompilasikan dengan fenomena baru dalam perpolitikan Indonesia yaitu mengenai Populisme. Seperti diketahui, konstelasi elite yang baru-baru ini terjadi pada Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu dan Pilpres 2019 telah mengenalkan hal baru pada rakyat mengenai populisme. Dalam sirkulasi tersebut, pertentangan yang amat kontras antara rakyat dan penguasa amat begitu kentara. Hal demikian terjadi tentu bukan spontanitas. Aksi yang digelar dengan berjilid-jilid dan mampu menggerakkan ribuan bahkan jutaan massa dengan berbagai sentimen yang dibuat, tentu saja dibelakangnya bermotif politis. Dari peristiwa yang terjadi penulis mencoba melihat kiprah partai Islam di masa reformasi ini untuk masa depan demokrasi ditengah Indonesia sebagai negara yang heterogen dan memiliki ragam suku, agama, ras, budaya yang begitu banyak dan bermacam-macam.
- c. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah gerakan populisme Islam yang akhir-akhir ini marak di

Indonesia merupakan gerakan sendiri atau menyangkut dengan gerakan Islam global dibawah naungan khilafah. Meski problem ini masih kompleks untuk dilihat, pernyataan-pernyataan yang disebarakan di media massa menyatakan bahwa gerakan mereka menyangkut dengan kejayaan Islam internasional. Jika demikian adanya, telah sejauh mana mereka mendorong misionaris ini.

## **E. Manfaat Penelitian**

Setiap upaya yang dilakukan dalam penelitian tentu saja akan ada manfaat-manfaat yang bisa digunakan baik untuk kepentingan akademis maupun untuk hanya sekedar bahan bacaan untuk memperluas wawasan orang yang membacanya. Dalam proses penelitian yang dilakukan, penulis sendiri benemukan banyak hal baru dalam ilmu politik yang sebelumnya tidak di dapatkan di dalam setiap perkuliahan.

### **1. Manfaat Akademis**

Dalam keadaan dunia yang terus bergerak dan dialektis, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pun turut pula

bergerak dan dialektis. Gejala-gejala baru didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat tersebut menarik banyak ilmuan yang fokus dibidangnya masing-masing untuk mengamati serta meneliti setiap gerak dari perkembangan masyarakat yang nantinya akan menjadi teori-teori baru yang muncul dalam dunia akademis maupun diluar lingkungan akademis. Penulis sendiri berharap, penelitian ini juga membuka diskursus baru atas apa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk didiskusikan secara mendalam dalam dunia akademis

## **2. Manfaat Praktis**

Untuk menopang dan mencari pengetahuan tentu saja tidak melulu harus dalam dunia pendidikan. Masyarakat luas juga kadangkala membutuhkan referensi untuk mengetahui gerak berkembangnya kehidupan masyarakat.

## **3. Manfaat Untuk Penulis**

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, gejala baru yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia menarik

minat penulis untuk mengangkat tema ini sebagai bahan penelitian. Apalagi aktor-aktor populis banyak digerakan oleh elite agama Islam dimana agama tersebut menjadi keyakinan yang dominan di Indonesia. Namun disisi lain, Indonesia juga begitu amat heterogen. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan keilmuan yang tiada habis-habisnya.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Relefan

NO	NAMA/KET. PENULIS	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN/PERBE DAAN PENELITIAN
1.	<b>SURIANTO</b> adalah seorang Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	<b>Partai Politik            Islam Di            Indonesia Era            Reformasi</b>	Dalam penelitian ini, meski sama-sama membahas tentang Partai Politik Islam di era reformasi, sedidaknya ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis sendiri tulis yaitu soal orientasi

	Yogyakarta yang menulis Skripsi Tahun 2014		penelitiannya. Dalam penelitiannya itu, Suriyanto lebih memfokuskan penelitian pada karakteristik partai Islam dalam keadaan Indonesia baru saja mengalami masa transisinya. Sementara penulis sendiri lebih luas daripada itu, yakni membicarakan juga tentang bangkitnya populisme Islam yang dalam masa-masa sekarang menjadi trend dan menyita perhatian publik dan berbagai kalangan lain seperti praktisi dan pengamat
--	--	--	--

2	<p><b>Hermanu Jeobagio</b></p>	<p><b>Membaca Politik Islam Pasca Reformasi</b></p>	<p>Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun demikian ada perbedaan mendasar antar kedua penelitian ini. Jika Hermanu beranggapan bahwa lahirnya Islam Politik baru-baru ini adalah sebuah perjuangan baru yang betul-betul sedang diupayakan, namun penulis sendiri memiliki tanggapan lain bahwa lahirnya Islam politik ada satu histori yang tidak bisa dilepaskan korelasinya. Hermanu juga memisahkan definisi mengenai Islam politik dan</p>
---	--------------------------------	---	--

			<p>politik Islam. Untuk yang pertama ia memaknainya sebagai perjuangan kelompok muslim garis keras untuk mendapatkan dimensi kekuasaan, dan ketika dimensi itu diraih, Hukum Islam dijadikan <i>Philosophische grondslag</i>. Sementara politik Islam menggunakan simbol-simbol Islam sebagai basis <i>recruitment</i> massa dan tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.</p>
--	--	--	--

## **G. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan sebuah negara yang heterogen. Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami kolonialisasi yang berakhir dengan jerih payah perjuangan panjang dan berdarah-darah, melibatkan berbagai kelompok etnik dan keagamaan, turut pula mempengaruhi polemik antar para pendiri bangsa akan seperti apa bangsa ini kedepan dan sistem apa pula yang harus dianut oleh Indonesia merdeka. Setidaknya, ada tiga komponen kekuatan yang mengisi panggung politik nasional kala itu antara lain; kelompok Nasionalis Sekuler, kelompok Islamis, dan kiri progressif. Islam, sebagaimana diketahui merupakan kelompok mayoritas di Indonesia sejak masa-masa revolusi, memegang penting kendali politik, kemudian menjadi oposisi satu-satunya pada masa Orba berkuasa. Dalam masa-masa revolusi, yaitu dalam rangka menyumbangkan peran dalam membangun dan menegakkan negara RI, partai Masyumi misalnya (sebagai partai yang cukup besar kala itu), selalu masuk dalam kabinet koalisi baik dalam kabinet Syahrir I, II

dan III, maupun dalam kabinet Amir Syarifuddin II. Namun keikutsertaan tersebut lepas kandas karena ada kesepakatan *Perjanjian Renville*, yang dianggap merugikan bangsa Indonesia karena ada pengurangan teritori kedaulatan republik yang diberikan kepada pihak penjajah.<sup>12</sup>

Sementara itu, B.J Boland menggambarkan, dalam kurun waktu revolusi fisik (1945-1959) dapat disifatkan sebagai suatu periode yang secara relatif terdapat persatuan dalam perjuangan, yaitu persatuan antara pemimpin Muslim dan kelompok-kelompoknya sendiri, seperti juga dikalangan Islam dan Sekuler. Sudah tentu terjadi sejumlah besar insiden, dan kadang-kadang persaingan sengit dan pergulatan untuk memperoleh kekuasaan yang bersimharajalela di balik layar. Salah satu diantara konflik yang timbul pertama kalinya adalah antara kelompok Syahrir yang demokratis dan antifasis itu dan Partai Nasional Indonesia seperti yang dibentuk Subardjo dalam bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang. Komunis

---

<sup>12</sup>Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, 2016), h. 43.

Nasional Tan Malaka juga mempunyai keinginan besar untuk menduduki posisi kepemimpinan.<sup>13</sup>

Partai Masyumi sendiri dalam sejarah perpolitikan Indonesia adalah partai pertama yang mengusung Islam sebagai ideologi perjuangannya. Partai ini lahir atas respon dari keluarnya Maklumat pemerintah tanggal 4 November 1945 yang memperbolehkan berdirinya sebuah partai dan sekaligus mendapatkan dukungan dari ormas Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam perjalannya, partai Islam mengalami pasang surut seiring dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah. Seperti yang ditulis Lili Romli, pasang surut tersebut bisa dilihat dari sejak Indonesia berdiri hingga sekarang. Masa tatkala demokrasi parlementer diberlakukan, kiprah partai politik Islam begitu meningkat dengan sangat signifikannya. Namun pada saat sistem negara berkonfederasi menjadi demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila, partai

---

<sup>13</sup>B.J Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia, buku terjemahan dari The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, cetakan pertama, 1985), h. 43.

politik Islam dimarginalkan dari pentas politik nasional. Dan reformasi merupakan momuntum besar bagi partai Islam untuk meluapkan ekspresinya yang telah lama dikungkung kekuasaan.

Ketika Orde Baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat Islam memang banyak berharap supaya Masyumi sebagai partai pertama yang merepresentasikan kepentingan umat Islam bisa diperbolehkan tampil kembali kepentas politik. Ternyata fakta berkata lain, demi kepentingan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Orba kemudian melakukan restrukturisasi sistem kepartaian di Indonesia. Sejumlah partai dipaksa melakukan fusi agar tidak terlalu banyak partai politik. Partai-partai Islam seperti Permusi, NU, PSII dan Perti difusikan pada satu wadah yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara partai yang lain seperti PNI, Partai Katolik, Parkindo dan IPKI turut pula difusikan. Tidak sekedar mengerutkan peran partai, Orba juga melakukan ideologisasi untuk semua komponen organisasi menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal dan ideologi.

Dari sinilah PPP sebagai kekuatan terakhir umat Islam harus hilang dengan beralihnya asas perjuangan PPP dari Islam menjadi Pancasila.<sup>14</sup>

Masih dalam jurnal yang sama, Lili Romli juga menggambarkan banyak pengamat menyampaikan tesisnya bahwa sejak saat itu, peran partai Islam dalam pentas politik akan berakhir dan tidak lagi akan muncul. Namun ternyata faktanya tidak. Pasca kejatuhan Orde Baru, partai-partai yang beraliran Islam banyak bermunculan dengan wujud yang berbeda-beda orientasinya. Jika pada era Orla dan Orba ada Masyumi, di era reformasi bangkit sebuah partai yang dalam platform perjuangannya ingin supaya Islam menjadi sebuah sistem yang diterapkan oleh negara Indonesia dan perjuangannya sama persis dengan Ihwanul Muslimin yang ada di Mesir, yaitu Partai Keadilan yang sekarang menjadi PKS.<sup>15</sup> Dalam hal ini perlu dibedakan antara Islam politik dan

---

<sup>14</sup>Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No. 1, 2004, h. 43.

<sup>15</sup>Novianto Ari Prihatin, "Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera)", Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8 No. 1, 2016, h. 71.

Politik Islam. Untuk yang pertama merupakan perjuangan kelompok muslim garis keras untuk mendapatkan dimensi kekuasaan, dan ketika dimensi itu diraih, Hukum Islam dijadikan *Philosophische grondslag*. Sementara politik Islam menggunakan simbol-simbol Islam sebagai basis *recruitment* massa dan tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.<sup>16</sup>

Landasan utama mengapa beberapa partai politik memilih Islam sebagai asas perjuangannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Bahtiar Efendi, bahwa Islam dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang amat menonjol yaitu sifatnya yang “hadir dimana-mana”. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa dimana-mana, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.<sup>17</sup> Bahkan sejumlah kalangan muslim melangkah lebih jauh dari itu; mereka menakankan bahwa Islam

---

<sup>16</sup>Hermanu Joebagio, Membaca Politik Islam Pasca Reformasi, Jurnal Agastya, Vol. 6, No. 1, Januari 2016, h. 3.

<sup>17</sup>Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), h. 7

merupakan sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Tak diragukan lagi, mereka percaya sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh yang meliputi tiga “D” yang terkenal antara lain: *din* (Agama), *Dunya* (Dunia), dan *Daulah* (Negara).

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada kajian dan telaah gerakan Islam konservatif di Indonesia dari era reformasi hingga sekarang. Mencuatnya populisme Islam karena latar belakang ketimpangan sosial ekonomi secara global telah membangkitkan kelompok ini untuk mendorong solidaritas internasional merubah stuktur sistem Negara yang gagal membawa umat pada keadilan dan kesejahteraan, demikianlah motif ideologisnya. Indonesia yang merupakan berpenduduk mayoritas muslim, ketimpangan sosial ekonomi ini dijadikan peluang oleh kelompok Islam politik disatu sisi, dan dimanfaatkan oleh elite politik oligarki disisi yang lain diluar kekuasaan sebagai narasi politik yang mempertentangkan antara ummat dan penguasa yang dianggap korup.

## **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

### **a. Jenis Penelitian**

Secara umum pendekatan penelitian atau sering disebut sebagai paradigma penelitian yang cukup umum adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya secara sederhana adalah Penelitian kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang lebih luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di pemukiman. Sementara penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah. Namun, memiliki kedalaman bahasa yang terbatas.

Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan data sedangkan penelitian kualitatif lebih pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumentnya.

Wahidmuri, membedakan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Secara umum metodologi penelitian masih bersifat konseptual dan teoritis. Sehingga ketika belajar tentang metodologi penelitian

yang dibahas dan dibicarakan yaitu tentang teori-teori dan konsepsi yang berkaitan dengan metode penelitian; artinya pembahasan tersebut masih banyak mengutip pendapat para pakar dari berbagai literatur yang ada.

Sedangkan yang dikehendaki dalam bagian metode penelitian dalam proposal penelitian, lebih dalam laporan penelitian adalah uraian tentang cara-cara yang akan dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalah penelitian atau fokus penelitian. Untuk itu, pada bagian metode penelitian harus diuraikan cara-cara tersebut secara operasional, namun tetap didukung oleh teori yang ada.<sup>18</sup> Dalam hal ini, penulis sendiri menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengelola data dari kajian kepustakaan

#### **b. Pendekatan**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Kepustakaan yang menguraikan teori-teori mengenai

---

<sup>18</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif", Jurnal J-PAI (Juli,2017) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h, 2

populisme Islam serta partai dan ormas yang berasaskan Islam secara sistematis dan seobjektif mungkin dari kajian-kajian pustaka.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebelumnya telah dikaji dahulu secara detail dan diambil dari sumber pustaka berupa: Buku, Jurnal, Karya Ilmiah, Internet dan literatur lain yang menopang penelitian ini.

## **3. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data**

Data-data yang telah terkumpul tidak serta merta dikutip. Namun dicermati dan divalidasi terlebih dahulu dengan objek kajian yang menjadi fokus penelitian agar akurat. Sementara untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif menggunakan logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang khusus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan bagaimana politik Islam mewarnai atau bahkan mendominasi perpolitikan Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis akan membaginya dalam 5 (Lima) pembahasan antara lain sebagai berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini akan diuraikan beberapa persoalan antara lain: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relefan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian serta Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIK**

Dalam pembahasan BAB ini akan dijabarkan kajian teoritiknya mengenai demokrasi dan partai politik yang terkait erat dengan Negara hukum modern dan bagaimana partai politik akan mempengaruhi sistem demokrasi yang ada

### **BAB III : DINAMIKA PERPOLITIKAN ISLAM DI**

**INDONESIA** Dalam BAB III ini penulis akan menjabarkan dinamika perpolitikan Islam yang ada di Indonesia dari masa-kemasa dimulai dari berdirinya Republik Indonesia

## **BAB IV : POLITIK MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA**

BAB ini merupakan segmentasi penulis untuk memaparkan secara khusus analisis terhadap isi penelitian ini. Dan analisa yang dibangun memfokuskan pada politik moderasi diterapkan di Indonesia

## **BAB V : PENUTUP**

Segmen terakhir ini penulis akan merefleksikan secara kritis dari apa yang telah dikaji dan diteliti untuk karya ilmiah berupa skripsi ini. Dalam pembahasannya akan memuat banyak kesimpulan dari penelitian yang penulis bahas. Selebihnya merupakan saran dan kritik yang dirasionalisasi. Tentu saja dalam hal ini penulis menyadari betul banyak kekurangan dan kekeliruan yang tidak mampu dianalisa secara detail.